

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2025

**DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2025**

Jl. Gubernur Suryo No.5 Telp. (0334) 890388, Email.
(dpkp388@gmail.com) Lumajang - 67315

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembuatan laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam P-Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 – 2026 pada awal tahun dan juga Renstra Tahun 2025 - 2029 yang telah ditetapkan pada TW III guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan juga merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran atas pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran tahun 2025 dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Laporan Kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran sehingga dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan dalam pencapaian kinerja pada masa mendatang yang lebih produktif, efektif dan efisien serta laporan ini juga memuat rencana tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan kinerja sebagai bagian dari proses pembelajaran berkelanjutan dalam peningkatan akuntabilitas dan kualitas kinerja perangkat daerah.

Kami sadar bahwa dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan pada masa yang akan datang.

Lumajang, 5 Januari 2026

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Lumajang



ARIS PIDEKSO, S.T., M.T

NIP. 19720526 200604 1 018

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum	1
1.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	1
1.1.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	2
1.1.3 Sumber Daya Manusia (Sdm) Perangkat Daerah.....	7
1.1.4 Sumber Daya Sarana dan Prasarana	7
1.2. Isu Strategis.....	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Kinerja Utama Perangkat Daerah	11
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	13
2.3. Program Dan Kegiatan Yang Mendukung IKU.....	15
BAB II. AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	21
3.1.1. Pengukuran Kinerja	21
3.1.2. Analisis Capaian Kinerja	24
3.1.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025..	24
3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya	28
3.1.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra	30
3.1.2.3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Awal dengan Target Akhir Renstra 2024-2026	30
3.1.2.3.2 Perbandingan Realisasi Perubahan Kinerja dengan Target Akhir Renstra 2025-2029	30
3.1.2.4. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain .	32
3.1.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan dan Rencana Tindak Lanjut dan Upaya Perbaikan Kinerja	34

3.1.2.5.1	Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	34
3.1.2.5.2	Rencana Tindak Lanjut dan Upaya Perbaikan Kinerja.....	40
3.1.2.6.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	41
3.1.2.7.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	44
3.2.	Realisasi Anggaran	46
3.2.1.	Capaian Kinerja Lain.....	48
3.2.2.	Penghargaan	52
3.2.3.	Inovasi	53
BAB IV.	PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL 1.1

Komposisi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 7

TABEL 1.2

Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 8

TABEL 2.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Berdasarkan P-Renstra 2024-2026 11

TABEL 2.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Berdasarkan P-Renstra 2025-2029 12

TABEL 2.3

Perjanjian Kinerja Awal Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 14

TABEL 2.4

Perubahan perjanjian Kinerja Awal Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 14

TABEL 2.5

Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU Awal (SK 100.3.3.2/571/427.12/2023)..... 16

TABEL 2.6

Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU Baru (SK 100.3.3.2/405/KEP/427.12/2025) 17

TABEL 3.1

Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja..... 22

TABEL 3.2

Capaian Kinerja Tahun 2025 22

TABEL 3.3

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 24

TABEL 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 s/d 2023 (Berdasarkan Dokumen P-Renstra 2018-2023)..... 28

TABEL 3.5

Capaian Kinerja dari Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2024-2026) 28

TABEL 3.6

Capaian Kinerja dari Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2025-2029)	29
TABEL 3.7	
Perbandingan Realisasi Kinerja Awal Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2024-2026	30
TABEL 3.8	
Perbandingan Realisasi Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2025-2029.....	30
TABEL 3.9	
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain.....	32
TABEL 3.10	
Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026.....	41
TABEL 3.11	
Efisiensi Penggunaan Sumber Data	41
TABEL 3.12	
Realisasi Anggaran 2025.....	46
TABEL 3.13	
Realisasi Anggaran Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya.....	47
TABEL 3.14	
Realisasi Rencana Aksi RB Tematik Investasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	48
TABEL 3.15	
Realisasi Rencana Aksi RB Tematik Kemiskinan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	49

DAFTAR GAMBAR

Halaman

GAMBAR 1

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.....	2
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja di setiap perangkat daerah berdasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Waktu penyampaian laporan kinerja paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kerjanya direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasi.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 secara sistematis untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan penggunaan 1 anggaran yang telah dialokasikan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.1. GAMBARAN UMUM

1.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

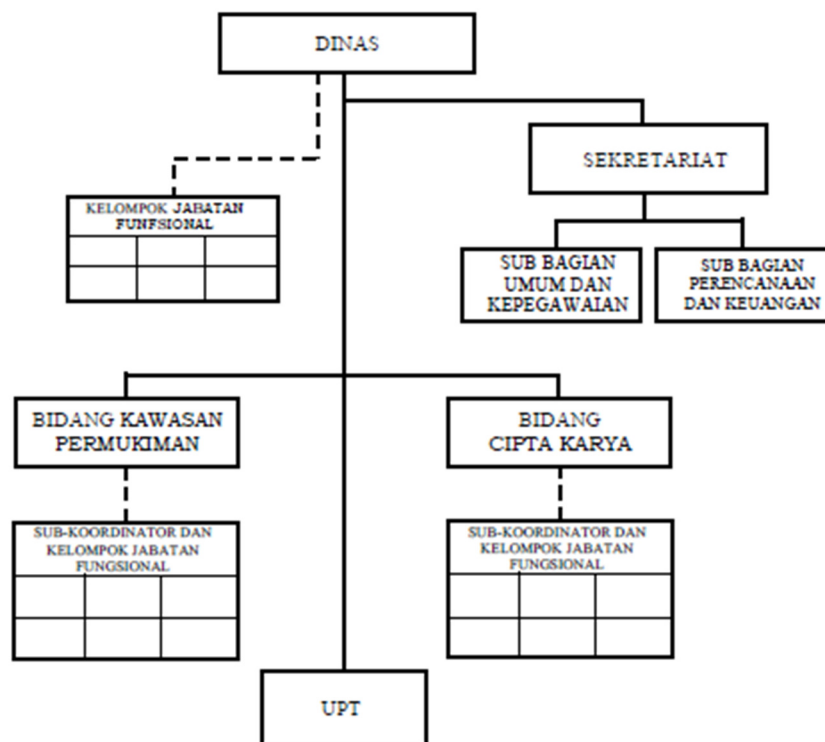
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan

Kawasan permukiman yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Kawasan Permukiman terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Cipta Karya terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
5. UPT-PALD
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan struktur organisasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagaimana berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang

1.1.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut ini merupakan tugas dan fungsi dari setiap bagian organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang:

❖ **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik daerah dan kerumahtanggaan kantor di lingkungan Dinas berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
3. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
4. Pengelolaan urusan rumah tangga;
5. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
6. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal;
8. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;
9. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
10. Pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
11. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
13. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:

1. Menyiapkan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;

2. Melakukan administrasi kepegawaian;
3. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang inventaris;
4. Menyelenggarakan dan menyusun SOP bidang umum dan kepegawaian;
5. Menyiapkan penataan organisasi dan tata laksana;
6. Melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
7. Menyiapkan pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban serta urusan dalam pegawai;
8. Melaksanakan urusan utilitas, bangunan gedung dan sarana prasarana lingkungan;
9. Melaksanakan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik daerah;
10. Melaksanakan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
11. Menyusun rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
12. Mengembangkan sistem informasi;
13. Menyelenggarakan dan mengelola pengamanan data dan informasi;
14. Mengendalikan mutu sistem dan teknologi informasi;
15. Mengelola pelayanan informasi publik;
16. Menyelenggarakan publikasi;
17. Mengelola dan menyebarluaskan informasi;
18. Mengelola perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Dinas;
19. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan sub bagian tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas:

1. Melaksanakan koordinasi perencanaan program dan kegiatan Dinas;
2. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan rencana strategi dan rencana kinerja tahunan serta dokumen penganggaran rencana kegiatan dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
3. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan administrasi keuangan anggaran;
4. Melaksanakan tata laksana keuangan dan perbendaharaan penatausahaan penerimaan negara buku pajak dan badan layanan usaha, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan Dinas;

5. Mengoordinasikan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Dinas;
6. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
7. Menyiapkan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga;
8. Menyelenggarakan dan menyusun SOP bidang perencanaan keuangan;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan sub bagian tugasnya.

❖ **Bidang Kawasan Permukiman**

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan dan di bidang penyediaan rumah. Dalam melaksanakan tugas Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Kawasan Permukiman;
2. Pengoordinasian seluruh pelaksanaan kegiatan pada Bidang Kawasan Permukiman;
3. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan dalam rangka pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
4. Penyelenggaraan dan penyusunan SOP Bidang Kawasan Permukiman;
5. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan serta fasilitasi kegiatan penataan bangunan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kawasan Permukiman dalam laporan kinerja individu;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Kawasan Permukiman;
8. Pelaksanaan administrasi di Bidang Kawasan Permukiman;
9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sesuai dengan bidangnya

❖ **Bidang Cipta Karya**

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah, pengembangan sistem penyediaan air bersih dan pengembangan drainase lingkungan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Cipta Karya;
2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Cipta Karya;
3. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Cipta Karya yang meliputi penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah dan pengelolaan drainase lingkungan;
4. Pengkoordinasian seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang Cipta Karya, yaitu penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah dan pengelolaan drainase lingkungan;
5. Penyelenggaraan dan penyusunan SOP Bidang Cipta Karya;
6. Penyiapan fasilitas seluruh pelaksanaan kegiatan Bidang Cipta Karya, yaitu penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah dan pengelolaan drainase lingkungan;
7. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Cipta Karya dalam laporan kinerja individu;
8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

❖ **Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Dalam melaksanakan tugas UPT mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran UPT PALD;
2. Menyusun rencana kerja tahunan teknis operasional UPT PALD;
3. Menyusun jadwal kegiatan PALD;
4. Melaksanakan koordinasi dengan internal dinas maupun luar dinas;
5. Mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan SPAL-S dan SPAL-T;
6. Melaksanakan sosialisasi, advokasi, kampanye, promosi kepada masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik, melalui aktifitas sedot tinja dan IPLT;
7. Melaksanakan kerjasama sedot tinja dengan badan usaha swasta;
8. Memverifikasi kelengkapan dokumen badan usaha sedot tinja swasta;
9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan UPT PALD; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

❖ **Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sub-koordinator pelaksana fungsi

pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Jabatan Administrator masing-masing.

1.1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 80 (Delapan Puluh) orang (kondisi per 31 Desember 2025), dengan komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Jabatan Dalam Organisasi	Jenis Kelamin		Status Kepegawaian			Ijazah										Eselon			Ket.	
		L	P	PNS	P3K	P3K PW	SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	2	3	4		
1.	Kepala Dinas	1		1											1			1			
2.	Sekretaris		1	1										1					1		
3.	Kepala Bidang	2		2						1				1					2		
4.	Kepala Sub Bagian	2		2										2						2	
5.	Kepala UPT		1	1											1					1	
6.	Pejabat Fungsional	4	9	10	3								1	10	2						
7.	Pejabat Pelaksana	16	8	17	7				3			1		20							
8.	PPPK Paruh Waktu	28	8			36			7		4	1	2	22							
Jumlah		53	27	34	10	36			10	1	4	2	3	56	4			1	2	2	

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, total pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2025 sebanyak 80 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural sebanyak 7 orang, pejabat fungsional sebanyak 13 orang, PNS dan PPPK sebanyak 24 orang, dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 36 orang. Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan pada sebesar 66% : 34 % dengan pegawai laki-laki sebanyak 53 orang dan perempuan sebanyak 27 orang.

1.1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selain didukung oleh sumber daya manusia juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan.

Adapun sarana prasarana pendukung yang tersedia pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman disajikan pada tabel 1.2 di bawah ini :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi Barang
	TANAH	Bidang	732	
1	Tanah	Bidang	732	Baik
	PERALATAN DAN MESIN	Buah / Set	388	
2	Alat Besar	Buah / Set	10	Baik
3	Alat Angkutan	Buah	25	3 Rusak ringan, 22 baik
4	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	Buah	22	4 Rusak ringan, 18 baik
5	Alat Pertanian	Buah / Set	0	
6	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Buah	234	14 Rusak ringan, 220 baik
7	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Buah	10	Baik
8	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Buah	6	baik
9	Alat Laboratorium	Buah	0	
10	Alat Persenjataan	Buah	0	
11	Komputer	Buah	80	13 Rusak ringan, 67 baik
12	Alat Eksplorasi	Buah	0	
13	Alat Pengeboran	Buah	0	
14	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	Buah	0	
15	Alat Bantu Eksplorasi	Buah	1	baik
16	Alat Keselamatan Kerja	Buah	0	
17	Alat Peraga	Buah	0	
18	Peralatan Proses/Produksi	Buah	0	
19	Rambu - Rambu	Buah	0	
20	Peralatan Olah Raga	Buah	0	
	GEDUNG DAN BANGUNAN	Buah	7	
21	Bangunan Gedung	Buah	6	Baik

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi Barang
22	Monumen	Buah	1	Baik
23	Bangunan Menara	Buah	0	
24	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Buah	0	
	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	Buah	92	
25	Jalan Dan Jembatan	Buah	80	Baik
26	Bangunan Air	Buah	2	Baik
27	Instalasi	Buah	7	Baik
28	Jaringan	Buah	3	Baik
	ASET TETAP LAINNYA	Buah	0	
29	Bahan Perpustakaan	Buah / Set	0	
30	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	Buah / Set	0	
31	Hewan	Ekor / Buah	0	
32	Biota Perairan	Ekor /Buah	0	
33	Tanaman	Ekor /Buah	0	
34	Barang Koleksi Non Budaya	Ekor /Buah	0	
35	Aset Tetap Dalam Renovasi	Ekor /Buah	0	
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	Buah	1	
36	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Buah	1	
Total			1.220	

1.2. ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di periode mendatang.

Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah diantaranya :

1. Isu Strategis berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu isu strategis terkait **Infrastruktur Pendukung Ekonomi dan Layanan Dasar**. Pemenuhan SPM bidang urusan pekerjaan umum penyediaan air bersih dan air minum serta sanitasi layak masih menjadi isu strategis karena belum terpenuhi sedangkan pada SPM bidang perumahan rakyat masih adanya Kawasan kumuh diwilayah perkotaan serta masih adanya rumah tidak layak huni.

2. Isu Strategis berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029, isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah **Kurangnya Akses Infrastruktur Dasar dan Kurangnya Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hunian Layak**. Kedua isu strategis ini ditentukan dengan memperhatikan potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah, permasalahan perangkat daerah, isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta isu lingkungan dalam lingkup global, nasional, dan regional yang relevan dengan perangkat daerah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

0.1. KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang telah diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator yang baik. IKU ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian kinerja pada setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target yang telah direncanakan. Pada awal Tahun 2025, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masih menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/571/427.12/2023 tentang Indikator Kinerja Utama, yang menjadi acuan pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Namun, seiring ditetapkannya P-RENJA Tahun 2025 yang telah mengacu pada RENSTRA Tahun 2025-2029, maka mulai Triwulan III Tahun 2025, pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menggunakan IKU terbaru yang selaras dengan dokumen RENSTRA Tahun 2025-2029 sebagaimana nomor SK IKU Nomor 100.3.3.2/405/KEP/427.12/2025. Dengan demikian, pelaporan kinerja Tahun 2025 memuat dua periode penggunaan IKU, yaitu :

1. IKU berdasarkan SK Bupati Nomor 100.3.3.2/571/427.12/2023 yang berlaku sampai Triwulan II 2025.
2. IKU baru berdasarkan SK Bupati Nomor 100.3.3.2/405/KEP/427.12/2025 yang berlaku mulai Triwulan III 2025.

Kedua kelompok IKU tersebut tetap diukur dan dianalisis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perencanaan sebelum dan sesudah perubahan. Rincian Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ditampilkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Berdasarkan P-Renstra 2024-2026

No	Tujuan/Sasaran/IKU	IKU Lama (SK 571/2023)	Satuan	Formulasi	Target 2025	Keterangan Perubahan
1	Tujuan: Terwujudnya ruang wilayah yang nyaman dan berkelanjutan	Indikator: Indeks layanan infrastruktur dasar	Satuan	{ (Capaian akses air minum layak s/d tahun N-1 + (Jumlah Jiwa yang terlayani Tahun N/Jumlah penduduk x 100)) + (Capaian akses air limbah domestik s/d tahun N-1 + (Jumlah jiwa yang terlayani tahun N/Jumlah	0,41	Berubah (Tidak Dipakai pada Renstra 2025-2029)

No	Tujuan/Sasaran/ IKU	IKU Lama (SK 571/2023)	Satuan	Formulasi	Target 2025	Keterangan Perubahan
				penduduk x 100)) + (= { (Jumlah RTLH tertangani Tahun N/Jumlah total RTLH x 100) + (Luas Kawasan kumuh tertangani tahun N/Total luas Kawasan kumuh x 100) + (Jumlah PSU terehab dan terbangun s/d tahun N-1 + Jumlah PSU terehab dan terbangun tahun N) / Jumlah total PSU perumahan s/d tahun 2022 x 100) + (Jumlah Kawasan strategis terfasilitasi / jumlah Kawasan strategis x 100) + (jumlah Kawasan desa tertangani / jumlah Kawasan desa x 100) } / 5) + (= Jumlah rumah terbangun (pembangunan baru) s/d tahun N / Jumlah backlog rumah x 100) } / 4 / 100		
1	Sasaran 1: Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar	Persentase akses air minum yang layak	Persen	Capaian akses air minum layak s/d tahun N-1 + (Jumlah Jiwa yang terlayani Tahun N/Jumlah penduduk x 100)	83,77%	Berubah (Tidak Dipakai pada Renstra 2025-2029)
		Persentase akses air limbah domestik yang layak	Persen	Capaian akses air limbah domestik s/d tahun N-1 + (Jumlah jiwa yang terlayani tahun N/Jumlah penduduk x 100)	69,20%	Berubah (Tidak Dipakai pada Renstra 2025-2029)
2	Sasaran 2: Meningkatnya kualitas lingkungan hunian	Persentase luasan lingkungan hunian yang tertata	Persen	{ (Jumlah RTLH tertangani Tahun N/Jumlah total RTLH x 100) + (Luas Kawasan kumuh tertangani tahun N/Total luas Kawasan kumuh x 100) + (Jumlah PSU terehab dan terbangun s/d tahun N-1 + Jumlah PSU terehab dan terbangun tahun N) / Jumlah total PSU perumahan s/d tahun 2022 x 100) + (Jumlah Kawasan strategis terfasilitasi / jumlah Kawasan strategis x 100) + (jumlah Kawasan desa tertangani / jumlah Kawasan desa x 100) } / 5	8,53%	Berubah (Tidak Dipakai pada Renstra 2025-2029)
3	Sasaran 3: Meningkatnya angka pemenuhan hunian	Persentase penanganan backlog perumahan	Persen	Jumlah rumah terbangun (pembangunan baru) s/d tahun N / Jumlah backlog rumah x 100	3,44%	Berubah (Tidak Dipakai pada Renstra 2025-2029)

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Berdasarkan P-Renstra 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran/ IKU	IKU Baru (SK 405/2025)	Satuan	Formulasi	Target 2025
1	Tujuan: Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Indikator: Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak,	Persen	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (PHLTB Proksi) = { (Jumlah Rumah Tangga Hunian Layak, Terjangkau, dan	76,90

No	Tujuan/Sasaran/IKU	IKU Baru (SK 405/2025)	Satuan	Formulasi	Target 2025
		Terjangkau, dan Berkelanjutan		Berkelanjutan (JRTHLTB Proksi) / (Jumlah Rumah Tangga (JRT)) } x 100%'	
1	Sasaran 1: Meningkatkan Akses Infrastruktur Dasar	Indikator: Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	Persen	Capaian Warga Negara/Penduduk yang Memperoleh Akses Melalui Sistem Penyediaan Air Minum hingga Tahun N dikurangi Capaian Warga Negara/Penduduk yang Memperoleh Akses Melalui Sistem Penyediaan Air Minum hingga Tahun N-1	0,55
		Indikator: Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) aman	Persen	Capaian Warga Negara/Penduduk yang memiliki akses sanitasi aman hingga Tahun N dikurangi Capaian Warga Negara/Penduduk yang memiliki akses sanitasi aman hingga Tahun N-1	0,17
2	Sasaran 2: Meningkatkan pemenuhan dan peningkatan kualitas lingkungan hunian layak	Indikator: Persentase lingkungan hunian yang tertata	Persen	{ ((Luas Kawasan Kumuh yang ditangani Tahun N + Luas Kawasan Kumuh yang ditangani sampai dengan Tahun N-1) dibagi Total Luas Kawasan Kumuh x 100%) + (Jumlah RTLH yang tertangani pada Tahun N dibagi Jumlah RTLH pada Tahun N x 100%) + (Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di Tahun N dibagi Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di Tahun N x 100%) } / 3	5,10
		Indikator: Persentase penanganan backlog perumahan	Persen	(Jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang perumahan + Jumlah rumah pembangunan baru korban bencana + Jumlah rumah pembangunan baru terdampak relokasi program pemerintah + Jumlah rumah diluar perumahan yang memiliki PBG + Jumlah Pembangunan Rumah Swadaya + Jumlah Pembangunan Rumah Baru Penanganan Kumuh + Jumlah Perbaikan RTLH) sampai dengan tahun N dibagi backlog rumah x 100 %	63,64

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renja dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025. Adapun perjanjian Kinerja Awal dan Perubahan Perjanjian

Kinerja setelah Renstra 2025-2029 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Awal Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar	Persentase Akses Air Minum yang Layak	83,66%
		Persentase Akses Air Limbah Domestik yang Layak	70,11%
		Persentase Panjang Drainase Lingkungan Terbangun	62,01%
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hunian	Persentase Luasan Lingkungan Hunian yang Tertata	8,58%
3.	Meningkatnya Angka Pemenuhan Hunian	Persentase Penanganan Backlog Perumahan	3,06%

No	Program	Anggaran
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 13.287.481.254,30
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 9.068.408.150,00
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 3.499.881.174,84
4.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 461.494.800,00
5.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 3.907.856.248,00
6.	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 923.489.500,00
7.	Program Kawasan Permukiman	Rp. 4.409.892.500,00
8.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 2.110.874.750,00
9.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 3.618.901.422,28
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.314.732.784,40
	Jumlah	Rp. 46.603.012.583,82

Tabel 2.4
Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
-----	-------------------	-------------------	--------

1.	Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di Kabupaten /Kota	0,55%
		Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestic) aman	0,17%
2.	Meningkatnya Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hunian Layak	Persentase Lingkungan Hunian yang Tertata	5,10%
		Persentase Penanganan Backlog Perumahan	63,64%

No	Program	Anggaran
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 4.381.578.386,66
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 2.329.627.800,00
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 3.975.967.074,84
4.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 426.948.800,00
5.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 4.518.386.246,50
6.	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 20.038.500,00
7.	Program Kawasan Permukiman	Rp. 4.385.721.500,00
8.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 3.126.980.750,00
9.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 3.537.607.744,28
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.594.361.820,34
	Jumlah	Rp. 32.697.218.622,62

2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG Mendukung IKU (KINERJA DAN ANGGARAN)

Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi menuju berlakunya RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2025–2029, maka indikator kinerja yang digunakan sepanjang tahun mengalami penyesuaian. IKU awal, yang ditetapkan melalui SK Bupati Nomor 100.3.3.2/571/427.12/2023, tetap digunakan sampai dengan Triwulan

II. Setelah terbitnya P-RKPD Tahun 2025, perangkat daerah melakukan penyesuaian kinerja dengan IKU baru yang selaras dengan RPJMD 2025–2029 dan mulai diterapkan pada Triwulan III. Dengan demikian, penyajian program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU pada Tahun 2025 disusun dalam dua tabel agar perbedaan dasar perencanaan dapat terlihat secara akuntabel.

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU Awal
(SK 100.3.3.2/571/427.12/2023)

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran
1	Tujuan 1 Terwujudnya ruang wilayah yang nyaman dan berkelanjutan	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	0,41	Rp. 26.063.664.336,00
	A. Sasaran 1 Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar	Persentase Akses Air Minum yang Layak	83,77 Persen	Rp. 3.956.968.633,00
		Persentase Akses Air Limbah Domestik yang Layak	69,20 Persen	Rp. 3.301.553.500,00
		Persentase Panjang Drainase Lingkungan Terbangun	56,30 Persen	Rp. 3.881.133.075,00
	a. Program 1 Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase peningkatan penduduk yang terlayani Infrastruktur Air Minum	0,13 Persen	Rp. 3.956.968.633,00
	• Kegiatan 1 Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Jumlah Jiwa yang Terlayani	1380 Jiwa	Rp. 3.956.968.633,00
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum pokok sehari-hari		
	b. Program 2 Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk yang terlayani Infrastruktur Air Limbah Domestik	0,20 Persen	Rp. 3.301.553.500,00
	• Kegiatan 1 Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang terlayani tahun N	2160 Jiwa	Rp. 3.301.553.500,00
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		
	c. Program 3 Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Peningkatan Panjang Drainase Lingkungan Terbangun	1,78 Persen	Rp. 3.881.133.075,00
	• Kegiatan 1 Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran Drainase Lingkungan yang Tertangani	3283 Meter	Rp. 3.881.133.075,00
	B. Sasaran 2 Meningkatnya kualitas lingkungan hunian	Persentase Luasan Lingkungan Hunian Yang tertata	8,53 Persen	Rp. 12.694.773.328,00
	a. Program 1 Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Kawasan yang tertangani	1,46 Persen	Rp. 2.668.817.440,00
	• Kegiatan 1 Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Desa yg ditangani	3 Kawasan	Rp. 2.668.817.440,00
	b. Program 2 Meningkatnya Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani	0,09 Persen	Rp. 4.155.894.700,00
	• Kegiatan 1 Tersusunnya Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditingkatkan	1,5 Ha	Rp. 4.155.894.700,00

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran
	Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
	c. Program 3 Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH diluar Kawasan Kumuh tertangani	0,35 Persen	Rp. 1.068.494.800,00
	• Kegiatan 1 Terlaksananya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Ditangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Ditangani	45 Unit Rumah	Rp. 1.068.494.800,00
	d. Program 4 Meningkatnya Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	27,15 Persen	Rp. 4.801.566.388,00
	• Kegiatan 1 Tersedianya perumahan yang difasilitasi pembangunan PSU nya	Jumlah perumahan yang difasilitasi pembangunan PSU nya	3 Lokasi	Rp. 4.801.566.388,00
	C. Sasaran 3 Meningkatnya Angka Pemenuhan Hunian	Persentase Penanganan Backlog Perumahan	3,44 Persen	Rp. 2.229.235.800,00
	a. Program 1 Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang ditata	86,67 Persen	Rp. 464.379.000,00
	• Kegiatan 1 Terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung yang memiliki PBG	1300 Unit	Rp. 464.379.000,00
	b. Program 2 Meningkatnya Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Backlog Perumahan	1,71 Persen	Rp. 1.764.856.800,00
	• Kegiatan 1 Tersusunnya Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp. 98.300.000,00
	• Kegiatan 2 Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang tertangani	42 Unit Rumah	Rp. 1.425.483.300,00
	• Kegiatan 2 Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Rekomendasi Teknis Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	21 Dokumen	Rp. 241.073.500,00

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU Baru
(SK 100.3.3.2/405/KEP/427.12/2025)

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran
1	Tujuan 1 Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	76,90	Rp. 22.647.164.431,00

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran
	A. Sasaran 1 Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	0,55 Persen	Rp. 4.381.578.387,00
		Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) aman	0,17 Persen	Rp. 2.329.627.800,00
	a. Program 1 Meningkatnya akses Warga Negara/Penduduk yang terlayani melalui Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Warga Negara/Penduduk yang memperoleh akses melalui Sistem Penyediaan Air Minum	58,39 Persen	Rp. 4.381.578.387,00
	• Kegiatan 1 Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	0,12 Persen	Rp. 4.381.578.387,00
		Jumlah Warga Negara/Penduduk yang terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari tahun N	1300 Jiwa	
	b. Program 2 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Warga Negara/Penduduk yang memiliki akses sanitasi aman	6,82 Persen	Rp. 2.329.627.800,00
	• Kegiatan 1 Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara/Penduduk yang terlayani sanitasi aman tahun N	0,17 Persen	Rp. 2.329.627.800,00
		Jumlah Warga Negara/Penduduk yang terlayani sanitasi aman pada tahun N	1904 Jiwa	
	B. Sasaran 2 Meningkatnya Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hunian Layak	Persentase Lingkungan Hunian yang Tertata	5,10 Persen	Rp. 15.088.970.944,00
		Persentase Penanganan Backlog Perumahan	63,64 Persen	Rp. 846.987.300,00
	a. Program 1 Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik	2,00 Persen	Rp. 426.948.800,00
	• Kegiatan 1 Terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase permohonan perizinan bangunan gedung yang difasilitasi	100 Persen	Rp. 426.948.800,00
	b. Program 2 Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Kawasan yang tertangani	8,29 Persen	Rp. 4.518.386.247,00
	• Kegiatan 1 Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Desa yang ditangani	17 Kawasan	Rp. 4.518.386.247,00
	c. Program 3 Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 Persen	Rp 97.685.000,00

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran
	yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100 Persen	Rp. 81.280.000,00
		Persentase Koordinasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 Persen	Rp. 241.073.500,00
	• Kegiatan 1 Tersedianya Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Kabupaten /Kota	Persentase Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 Persen	Rp. 97.685.000,00
	• Kegiatan 2 Terlaksananya pembangunan Rumah Khusus untuk Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten	Persentase Pembangunan Rumah Khusus untuk Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten	100 Persen	Rp. 81.280.000,00
	• Kegiatan 3 Terfasilitasinya Dokumen Rekomendasi Teknis Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Fasilitasi Dokumen Rekomendasi Teknis Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 Persen	Rp. 241.073.500,00
	d. Program 2 Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	4,34 Persen	Rp. 4.448.415.375,00
	• Kegiatan 1 Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas kawasan kumuh yang ditangani	26,6 Ha	Rp. 4.448.415.375,00
		Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	100 Persen	Rp. 4.448.415.375,00
	e. Program 3 Meningkatnya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	1,43 Persen	Rp. 3.126.980.750,00
	• Kegiatan 1 Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Ditangani	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	100 Persen	Rp. 3.126.980.750,00
	f. Program 4 Meningkatnya perumahan yang disediakan PSU	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	9,63 Persen	Rp. 3.537.607.744,00
	• Kegiatan 1 Meningkatnya peyelenggaraan PSU perumahan	Persentase perumahan yang difasilitasi penyediaan dan perbaikan PSU Jalan Lingkungannya	100 Persen	Rp. 3.537.607.744,00
		Persentase perumahan yang difasilitasi penyediaan dan perbaikan PSU Drainase Lingkungannya	100 Persen	Rp. 3.537.607.744,00
	d. Program 3 Meningkatnya Pengelolaan Drainase Lingkungan	Persentase pengelolaan Drainase Lingkungan	0,10 Persen	Rp. 3.975.967.075,00
	• Kegiatan 1 Meningkatnya Penyediaan Drainase Lingkungan	Persentase Drainase Lingkungan yang Tertangani	100 Persen	Rp. 3.975.967.075,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tidak dicantumkan pada daftar program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas sebab program tersebut merupakan program yang bersifat rutin dan fasilitatif sehingga tidak secara langsung menghasilkan capaian kinerja substantif sesuai dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah. Program ini berfungsi untuk memastikan kelancaran operasional organisasi dan berperan sebagai pendukung tidak langsung bagi terlaksananya program teknis dan program prioritas dalam mencapai IKU. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga keterkaitan yang jelas antara perencanaan, pelaksanaan program, dan pengukuran kinerja, maka daftar program dan kegiatan yang mendukung IKU di atas hanya difokuskan pada program yang memiliki kontribusi langsung dan terukur terhadap pencapaian IKU perangkat daerah. Program penunjang tetap dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, akan tetapi tidak dijadikan sebagai program utama pendukung IKU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

0.1.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah diraih. Indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian kinerja baik triwulan maupun tahunan. Langkah perbandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program.

Format pengukuran kinerja menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja (Bernilai Positif), maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja (Bernilai Negatif), digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selanjutnya guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang digunakan skala ordinal nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
1.	> 90%	Sangat Tinggi
2.	> 75% - 90%	Tinggi
3.	> 65% - 75%	Sedang
4.	> 50% - 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Total	Capaian (%)	Ket
				TW I	TW II	TW III	TW IV			
	TUJUAN									
	Terwujudnya ruang wilayah yang nyaman dan berkelanjutan	Indeks layanan infrastruktur dasar	0,41	0	-	-	-	0	0%	Renstra 2024-2026
	SASARAN									
	Sasaran 1 Meningkatnya akses infrastruktur dasar	Persentase Akses Air Minum yang layak	83,77%	0	-	-	-	0	0%	Renstra 2024-2026
		Persentase Akses Air Limbah Domestik yang layak	69,20%	0	-	-	-	0	0%	
	Sasaran 2 Meningkatnya kualitas lingkungan hunian	Persentase Luasan Lingkungan Hunian yang Tertata	8,53%	0	-	-	-	0	0%	Renstra 2024-2026
	Sasaran 3 Meningkatnya angka pemenuhan hunian	Persentase Penanganan Backlog Perumahan	3,44%	0	-	-	-	0	0%	Renstra 2024-2026
	TUJUAN									

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Total	Capaian (%)	Ket
				TW I	TW II	TW III	TW IV			
	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	76,90	-	-	0	71,92	71,92	93,52	Renstra 2025-2029 (Hasil Perhitungan dari BPS)
SASARAN										
	SASARAN 1 Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	0,55	-	-	0,03	0,50	0,53	98,56%	Renstra 2025-2029
		Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) aman	0,17	-	-	0,06	0,09	0,15	87,90%	
	SASARAN 2 Meningkatnya Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hunian Layak	Persentase Lingkungan Hunian yang Tertata	5,10	-	-	0	5,13	5,13	100,60 %	Renstra 2025-2029
		Persentase Penanganan Backlog Perumahan	63,64	-	-	62,03	1,12	63,15	99,23%	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui bahwa pengukuran atas pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan dengan menggunakan tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan

menggunakan indikator kinerja utama yang ditetapkan pada 2 (dua) rencana strategis yakni Renstra tahun 2024-2026 dan tahun 2025-2029 dengan uraian sebagai berikut:

❖ **Tujuan Awal: Terwujudnya ruang wilayah yang nyaman dan berkelanjutan**
Indikator kinerja tujuan terealisasi sebesar 0 (indeks) dengan capaian kinerja sebesar 0%.

❖ **Sasaran Strategis Awal:**

Indikator kinerja yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 5 indikator.

❖ **Tujuan Baru: Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan**

Indikator kinerja tujuan terealisasi sebesar 71,92 (indeks) dengan capaian kinerja sebesar 93,52%.

❖ **Sasaran Strategis Baru:**

1. Indikator kinerja dengan capaian realisasi $\geq 100\%$ sebanyak 1 indikator.
2. Indikator kinerja dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 3 indikator.

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja

3.1.2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan target dengan realisasi Kinerja tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kinerjanya yang ditetapkan di tahun 2025. Berikut ini merupakan perbandingan antara target dan realisasi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025:

Tabel 3.3

**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	TUJUAN				
1	Terwujudnya ruang wilayah yang nyaman dan berkelanjutan	Indeks layanan infrastruktur dasar	0,41	0	0%
	SASARAN				
1	Sasaran 1 Meningkatnya akses infrastruktur dasar	Persentase Akses Air Minum yang layak	83,77%	0	0%
		Persentase Akses Air Limbah Domestik yang layak	69,20%	0	0%
2	Sasaran 2 Meningkatnya kualitas lingkungan hunian	Persentase Luasan Lingkungan Hunian yang Tertata	8,53%	0	0%

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Sasaran 3 Meningkatnya angka pemenuhan hunian	Persentase Penanganan Backlog Perumahan	3,44%	0	0%
TUJUAN					
1	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	76,90	71,92	93,52%
SASARAN					
1	SASARAN 1 Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	0,55	0,53	98,56%
		Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) aman	0,17	0,15	87,90%
2	SASARAN 2 Meningkatnya Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hunian Layak	Persentase Lingkungan Hunian yang Tertata	5,10	5,13	100,60%
		Persentase Penanganan Backlog Perumahan	63,64	63,15	99,23%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi dan capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025 sebagai berikut :

❖ **Tujuan Lama : Terwujudnya ruang wilayah yang nyaman dan berkelanjutan**

Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator tujuan Indeks layanan infrastruktur dasar yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar sebesar 0,41 (indeks), terealisasi sebesar sebesar 0 (indeks) dengan capaian 0% atau tergolong capaian kerjanya sangat rendah (sesuai kriteria predikat). Rendahnya capaian tersebut disebabkan karena hasil pekerjaan fisik baru dapat diperhitungkan pada triwulan IV, sedangkan tujuan ini hanya digunakan hingga triwulan II. Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut:

❖ **Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya akses infrastruktur dasar**

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator 3 (tiga) indikator yakni:

- a. Persentase Akses Air Minum yang Layak yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 83,77%. Indikator sasaran ini terealisasi sebesar 0 (persen) dengan capaian 0% atau tergolong capaian kinerjanya sangat rendah (sesuai kriteria predikat). Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Persentase Akses Air Minum yang Layak = Capaian akses air minum layak s/d tahun N-1 sebesar 84,59% + (Jumlah jiwa yang terlayani tahun N sebesar 0 jiwa / Jumlah penduduk sebesar 1.116.231 jiwa x 100) = 84,59% (Tidak ada kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dan capaian terhitung sebesar 0% sehingga perlu dilakukan perubahan indikator dan formulasi kinerja, Sumber Data: DPKP)

- b. Persentase Akses Air Limbah Domestik yang Layak yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 69,20%. Indikator sasaran ini terealisasi sebesar 0 (persen) dengan capaian 0% atau tergolong capaian kinerjanya sangat rendah (sesuai kriteria predikat). Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Persentase Akses Air Limbah Domestik yang Layak = Capaian akses air limbah domestik s/d tahun N-1 sebesar 65,44% + (Jumlah jiwa yang terlayani tahun N sebesar 0 jiwa / Jumlah penduduk sebesar 1.116.231 jiwa x 100) = 65,44% (Tidak ada kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dan capaian terhitung sebesar 0% sehingga perlu dilakukan perubahan indikator dan formulasi kinerja, Sumber Data: DPKP)

- c. Persentase Panjang Drainase Lingkungan Terbangun yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 56,30%. Indikator sasaran ini terealisasi sebesar 0 (persen) dengan capaian 0% atau tergolong capaian kinerjanya sangat rendah (sesuai kriteria predikat). Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Persentase Panjang Drainase Lingkungan Terbangun = Capaian drainase terbangun sampai dengan tahun N-1 sebesar 45,25% + (Panjang drainase di tahun N sebesar sebesar 0 meter / Panjang kebutuhan drainase lingkungan sebesar 43.501 meter x 100) = 45,25% (Tidak ada kenaikan

dibandingkan tahun sebelumnya dan capaian terhitung sebesar 0% sehingga perlu dilakukan perubahan indikator dan formulasi kinerja, Sumber Data: DPKP)

❖ **Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan kualitas lingkungan hunian**

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase Luasan Lingkungan Hunian yang Tertata yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 8,53 (persen), terealisasi sebesar 0 (persen) dengan capaian 0% atau tergolong capaian kinerjanya sangat rendah (sesuai kriteria predikat). Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut:

Meningkatnya kualitas lingkungan hunian = { (Jumlah RTLH tertangani Tahun N sebesar 0 unit / Jumlah total RTLH sebesar 28.2201 unit x 100) + (Luas Kawasan kumuh tertangani tahun N sebesar 0 Ha / Total luas Kawasan kumuh sebesar 763,97 Ha x 100) + ((Jumlah PSU terehab dan terbangun s/d tahun N-1 sebesar 40 lokasi + Jumlah PSU terehab dan terbangun tahun N sebesar 0 lokasi) / Jumlah total PSU perumahan s/d tahun 2022 sebesar 151 unit x 100) + (Jumlah Kawasan strategis terfasilitasi sebesar 0 kawasan / jumlah Kawasan strategis sebesar 8 kawasan x 100) + (jumlah Kawasan desa tertangani sebesar 0 kawasan / jumlah Kawasan desa sebesar 205 kawasan x 100) } / 5 = 13,29% (Tidak ada kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dan capaian terhitung sebesar 0% sehingga perlu dilakukan perubahan indikator dan formulasi kinerja, Sumber Data: DPKP)

❖ **Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya angka pemenuhan hunian**

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase Penanganan Backlog Perumahan yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 3,44 (persen) , terealisasi sebesar 0 (persen) dengan capaian 0% atau tergolong capaian kinerjanya sangat rendah (sesuai kriteria predikat). Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Meningkatnya angka pemenuhan hunian = Jumlah rumah terbangun (pembangunan baru) s/d tahun N sebesar 1619 unit / Jumlah backlog rumah sebesar 90220 unit x 100 = 1,79% (Tidak ada kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar 1,79%, sehingga capaian terhitung sebesar 0% dan perlu dilakukan perubahan indikator dan formulasi kinerja, Sumber Data: DPKP)

3.1.2.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja beberapa tahun terakhir dari sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 s/d 2023
(Berdasarkan Dokumen P-Renstra 2018-2023)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
2019	Meningkatnya penanganan kawasan kumuh	1	Persentase Ketersediaan Rumah	96,2 %	98,1%	102 %											
		2	Persentase Luas Kawasan Kumuh	22,95%	26,21 %	114 %											
2020-2021	Meningkatnya penanganan kawasan kumuh	1	Luas Kawasan Kumuh tertangani sesuai SK				5,2 Ha	5,2 Ha	100%	3,58 Ha	5,71 Ha	160 %					
2022 - 2023	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah		Indeks Layanan Infrastruktur Dasar									0,52	0,54	104%	0,53	0,57	
	Meningkatnya Layanan Keciaptakarya		Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciaptakarya									76,34 %	86,55 %		77,34 %	89,62%	
	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur di Kawasan Strategis		Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur pada Kawasan Strategis									15,85 %	19,88 %		16,76 %	19,94%	
	Meningkatnya Luas Kawasan Kumuh tertangani		Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Kumuh Tertangani									62,77%	60,05 %		64,75 %	68,59%	
	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah		Persentase pemenuhan backlog									54,32 %	50,40%		54,91%	50,89%	

Ket :

- T = Target
- R = Realisasi
- C = Capaian

Tabel 3.5
Capaian Kinerja dari Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2024-2026)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Tahun 2025			Keterangan	
			T	R	C	T	R	C		
1	Tujuan Terwujudnya ruang wilayah yang nyaman dan berkelanjutan		Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	0.42	0.41	98%	0,41	0%	0%	
1	Sasaran 1 Meningkatnya akses infrastruktur dasar	a	Persentase Akses Air Minum yang Layak	83.55 %	84.59 %	101,24 %	83,77 %	0%	0%	
		b	Persentase Akses Air Limbah Domestik yang Layak	69.91 %	65.44 %	93,61 %	69,20 %	0%	0%	
2	Sasaran 2 Meningkatnya kualitas lingkungan hunian	a	Persentase Luasan Lingkungan Hunian yang Tertata	13.38 %	13.29 %	100,85 %	8,53%	0%	0%	
3	Sasaran 3 Meningkatnya angka pemenuhan hunian	b	Persentase Penanganan Backlog Perumahan	1.34%	1.79%	133,67 %	3,44%	0%	0%	

Tabel 3.6
Capaian Kinerja dari Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2025-2029)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Tahun 2025			Keterangan	
			T	R	C	T	R	C		
1	Tujuan Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	-	-	-	76,90%	71,92%	93,52%	
1	Sasaran 1 Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar	a	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	-	-	-	0,55%	0,53%	98,56%	
		b	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) aman	-	-	-	0,17%	0,15%	87,90%	
2	Sasaran 2 Meningkatnya Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hunian Layak	a	Persentase Lingkungan Hunian yang Tertata	-	-	-	5,10%	5,13%	100,60%	
		b	Persentase Penanganan Backlog Perumahan	-	-	-	63,64%	63,15%	99,23%	

Pada dokumen P-Renstra tahun 2018 sampai tahun 2023 dapat dilihat bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis. Pada awal tahun dokumen Renstra Tahun 2024-2026, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis yang perlu dicapai, sedangkan pada pertengahan tahun tepatnya pada triwulan III terjadi perubahan acuan berdasarkan Renstra 2025-2029 sehingga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang perlu dicapai. Jika diperbandingkan kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya, terdapat perbedaan tujuan dan sasaran strategis antara periode perencanaan tahun sebelumnya dengan tahun berjalan, sehingga kondisi kinerja tidak dapat diperbandingkan secara langsung. Selain itu, indikator sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman baru mulai ditetapkan dan diimplementasikan pada Triwulan III Tahun 2025 melalui dokumen P-RKPD yang telah mengacu pada Renstra 2025–2029. Perbedaan indikator kinerja tersebut terjadi karena Triwulan III Tahun 2025 merupakan masa transisi dari Renstra 2024–2026 menuju Renstra

2025–2029 yang telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025–2029.

3.1.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

3.1.2.3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Awal dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja awal tahun 2025 dengan target Akhir renstra 2024-2026 :

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Awal Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian
	Tujuan					
1.	Terwujudnya ruang wilayah yang nyaman dan berkelanjutan	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	0,41	0	0,42	0%
	Sasaran Strategis					
1.	Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar	Persentase Akses Air Minum yang Layak	83,77	0	84,49	0%
		Persentase Akses Air Limbah Domestik yang Layak	69,20	0	69,60	0%
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hunian	Persentase Luasan Lingkungan Hunian Yang tertata	8,53	0	8,81	0%
3.	Meningkatnya angka pemenuhan hunian	Persentase Penanganan Backlog Perumahan	3,44	0	5,25	0%

Dari tabel terlihat bahwa realisasi kinerja tujuan dan sasaran strategis lama tidak memenuhi target akhir renstra karena pada triwulan III terjadi perubahan tujuan dan sasaran strategis antara periode perencanaan tahun sebelumnya dengan tahun berjalan yang ditetapkan dan diimplementasikan melalui dokumen P-RKPD yang telah mengacu pada Renstra 2025–2029

3.1.2.3.2 Perbandingan Realisasi Perubahan Kinerja dengan Target Akhir Renstra 2025-2029

Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Akhir renstra 2025-2029 :

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian
	Tujuan					

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian
1.	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	76,90	71,92	84,98	84,63%
Sasaran Strategis						
1.	SASARAN 1 Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	0,55	0,53	1,68	31,55%
		Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) aman	0,17	0,15	1,26	11,90%
2.	SASARAN 2 Meningkatnya Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hunian Layak	Persentase Lingkungan Hunian yang Tertata	5,10	5,13	6,81	75,33%
		Persentase Penanganan Backlog Perumahan	63,64	63,15	74,79	84,44%

Dari tabel terlihat bahwa realisasi kinerja tujuan Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dengan indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan belum memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar 71,92 dengan capaian sebesar 84,63%. Untuk sasaran Meningkatkan Akses Infrastruktur Dasar dengan indikator Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota belum memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar 0,53% dengan capaian sebesar 31,55%. Sasaran Meningkatkan Akses Infrastruktur Dasar dengan indikator Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) aman belum memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar 0,15% dengan capaian sebesar 11,90%. Sasaran Meningkatkan Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hunian Layak dengan indikator Persentase Lingkungan Hunian yang Tertata belum memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar 5,13% dengan capaian sebesar 75,33%. Serta sasaran

Meningkatnya Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hunian Layak dengan indikator Persentase Penanganan Backlog Perumahan belum memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar 63,15% dengan capaian sebesar 84,44%.

3.1.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

Perbandingan realisasi tahun ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain tampak sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standart
Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota Lain	Capaian
TUJUAN LAMA						
1.	Terwujudnya ruang wilayah yang nyaman dan berkelanjutan	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	0,41	0	-	-
SASARAN STRATEGIS LAMA						
1.	Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar	Persentase Akses Air Minum yang Layak	83,77%	0%	100% (sumber data : RPJMN 2020-2024)	0%
		Persentase Akses Air Limbah Domestik yang Layak	69,20%	0%	90% (sumber data : RPJMN 2020-2024)	0%
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hunian	Persentase Luasan Lingkungan Hunian Yang tertata	8,53%	0%	70% (sumber data : RPJMN 2020-2024)	0%
3.	Meningkatnya angka pemenuhan hunian	Persentase Penanganan Backlog Perumahan	3,44%	0%	0% (sumber data : RPJMN 2020-2024)	0%
TUJUAN BARU						
1	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	76,90%	71,92%	67% (sumber data: RPJMN 2025-2029)	107,34%
SASARAN STRATEGIS BARU						
1	SASARAN 1	Persentase peningkatan	0,55%	0,53%	1,21% (sumber data: RPJMD 2025-2029)	43,80%

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota Lain	Capaian
	Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar	jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota				
		Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) aman	0,17	0,15%	0,01% (sumber data: RPJMD 2025-2029)	Melebihi target Provinsi
2	SASARAN 2 Meningkatnya Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hunian Layak	Persentase Lingkungan Hunian yang Tertata	5,10	5,13%	-	-
		Persentase Penanganan Backlog Perumahan	63,64	63,15%	-	-

Realisasi tujuan lama yakni Terwujudnya ruang wilayah yang nyaman dan berkelanjutan dengan indikator Indeks Layanan Infrastruktur Dasar pada tahun ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota lainnya. Hal ini juga berlaku untuk seluruh sasaran strategis lama sebab sampai triwulan II belum terdapat capaian realisasi yang dapat dihitung sebab pelaksanaan pekerjaan fisik baru dapat diukur pada triwulan IV. Sedangkan realisasi tujuan baru yakni Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dengan indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan pada tahun ini jika dibandingkan dengan standar nasional yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sebesar 67%, capaiannya sebesar 107,34%.

Sasaran Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar dengan indikator Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota pada tahun ini jika dibandingkan dengan standar Provinsi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 sebesar 1,21%, capaiannya sebesar 43,80%. Sedangkan untuk indikator Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) aman pada tahun ini jika dibandingkan dengan standar Provinsi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 sebesar 0,01%, capaiannya melebihi target pemerintah provinsi tersebut. Selanjutnya untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hunian Layak dengan indikator Persentase Lingkungan Hunian yang Tertata dan indikator Persentase Penanganan Backlog Perumahan belum dapat dibandingkan dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota lainnya yang memiliki karakteristik sama, sebab Kabupaten Lumajang memiliki indikator sasaran dan formulasi penghitungan yang berbeda.

3.1.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan dan Rencana Tindak Lanjut dan Upaya Perbaikan Kinerja

3.1.2.5.1 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dari pembahasan diatas dapat diketahui capaian tujuan atau sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagian besar sudah memenuhi target namun belum maksimal yaitu sebanyak 1 indikator melebihi 100% sehingga rata-rata capaian tahun 2025 adalah sebesar 96,07%, serta jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya maupun dari target kota/dinas yang menjadi *benchmark*. Adapun hal itu tentunya tidak luput dari beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaiannya, antara lain sebagai berikut :

❖ Tujuan Lama: Terwujudnya ruang wilayah yang nyaman dan berkelanjutan

Tujuan Terwujudnya ruang wilayah yang nyaman dan berkelanjutan dengan indikator Indeks Layanan Infrastruktur Dasar, capaian kinerja tahun ini sebesar 0% (tidak tercapai), jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami

penurunan sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 0%, hal ini didukung dengan adanya koordinasi dari berbagai pihak baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan masyarakat Kabupaten Lumajang.

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa perubahan tujuan dan sasaran strategis antara periode perencanaan tahun sebelumnya dengan tahun berjalan yang ditetapkan dan diimplementasikan pada Triwulan III Tahun 2025 melalui dokumen P-RKPD yang telah mengacu pada Renstra 2025–2029. Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan yakni melakukan sinergi program dan kegiatan secara terpadu lintas perangkat daerah dan lintas sektor serta melaksanakan kolaborasi pembiayaan selain APBD (DAK PPKT).

❖ **Sasaran Strategis Lama:**

Sasaran Meningkatnya akses infrastruktur dasar dengan indikator Persentase Akses Air Minum yang Layak dan Persentase Akses Air Limbah Domestik yang Layak, sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hunian dengan indikator Persentase Luasan Lingkungan Hunian Yang tertata, serta sasaran Meningkatnya angka pemenuhan hunian dengan indikator Persentase Penanganan Backlog Perumahan, capaian kinerja tahun ini sebesar 0% (tidak tercapai), jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 0%.

Hal ini hal ini didukung dengan adanya koordinasi dari berbagai pihak baik, akan tetapi dihadapkan pada kendala yakni perubahan tujuan dan sasaran strategis antara periode perencanaan tahun sebelumnya dengan tahun berjalan yang ditetapkan dan diimplementasikan pada Triwulan III Tahun 2025 melalui dokumen P-RKPD yang telah mengacu pada Renstra 2025–2029. Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan yakni melakukan sinergi program dan kegiatan secara terpadu lintas perangkat daerah dan lintas sektor.

❖ **Tujuan Baru: Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan**

Tujuan Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dengan indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan, capaian kinerja tahun ini sebesar 93,52% (tidak tercapai), tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena mengalami perubahan indikator dan formulasi, serta jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 84,98%, hal ini didukung dengan adanya:

1. Adanya kolaborasi pembiayaan dari Pemerintah Pusat melalui DAK PPKT sehingga terpenuhinya target beberapa program dan kegiatan yang telah ditentukan.
2. Adanya kerja sama dengan berbagai pihak dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur SPAM, Infrastruktur air limbah domestik, dan perbaikan RTLH.
3. Adanya pendampingan dari tenaga fasilitator lapangan dan konsultan Individu (KI) dalam pelaksanaan kegiatan.

Selain itu kendala/hambatan yang dihadapi berupa:

1. Minimnya ketersediaan air baku untuk air minum/air bersih di wilayah utara dan daerah rawan air.
2. Terdapat infrastuktur SPAM dan rumah layak huni yang rusak karena terdampak bencana.
3. Mengecilnya / mati sumber mata air sebagai air baku SPAM.

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut:

1. Koordinasi aktif dengan pihak Kementerian PUPR dan Kementerian PKP agar kedepan Kabupaten Lumajang mendapatkan bantuan pembiayaan dari APBN.
2. Koordinasi aktif dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dan instansi terkait lainnya untuk percepatan pelaksanaan SPAM Wilayah Utara.

3. Pembangunan Sumur Bor untuk lokasi Desa rawan air yang tidak memiliki air baku sumber mata air.
4. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dan Pembangunan Rumah Subsidi bagi Masyarakat Indonesia.

❖ **Sasaran Strategis 1:**

Sasaran Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar dengan indikator Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota, capaian kinerja tahun ini sebesar 98,56% (tidak tercapai), tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena mengalami perubahan indikator dan formulasi, serta jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 31,55%, hal ini didukung dengan adanya:

1. Adanya kolaborasi pembiayaan dari Pemerintah Pusat melalui APBN DAK PPTK.
2. Adanya kerja sama dengan berbagai pihak dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur SPAM.

Selain itu kendala/hambatan yang dihadapi berupa:

1. Adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan tidak dapat direalisasikannya kegiatan pembinaan pengelolaan dan pengembangan SPAM.
2. Mengecilnya / mati sumber mata air sebagai air baku SPAM termasuk infrastruktur SPAM yang rusak karena terdampak bencana.

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut:

1. Koordinasi aktif dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dan instansi terkait lainnya untuk percepatan pelaksanaan SPAM Wilayah Utara.
2. Pembangunan Sumur Bor untuk lokasi Desa rawan air yang tidak memiliki air baku sumber mata air.

3. Pengusulan lokasi infrastruktur SPAM terdampak bencana baik melalui APBN.
4. Penguatan Sinergi Program Kegiatan Pokja PKP terkait konservasi mata air.

❖ **Sasaran Strategis 1:**

Sasaran Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar dengan indikator Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) aman, capaian kinerja tahun ini sebesar 87,90% (tidak tercapai), tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena mengalami perubahan indikator dan formulasi, serta jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 11,90%, hal ini didukung dengan adanya:

1. Adanya kolaborasi pembiayaan dari Pemerintah Pusat melalui APBN DAK PPTK.
2. Adanya kerja sama dengan berbagai pihak dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur air limbah domestik.
3. Adanya pendampingan dari tenaga fasilitator lapangan dan konsultan Individu (KI) dalam pelaksanaan kegiatan.

Selain itu kendala/hambatan yang dihadapi berupa:

1. Adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan tidak dapat direalisasikannya penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja.
2. Kerjasama dengan pihak swasta terkait pembuangan dan pengelolaan lumpur tinja belum maksimal.
3. Adanya kerusakan pompa SPALDT yang menyebabkan kurang optimalnya operasi dan pemeliharaan pada Kawasan relokasi.

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi aktif dengan pihak Kementerian PUPR/Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur terkait kolaborasi pembiayaan.
2. Memaksimalkan pemanfaatan sarana yang telah ada serta mengoptimalkan peran BumDes dan Kelompok

Masyarakat untuk pengembangan layanan penyediaan tangki septic SNI di Masyarakat.

❖ **Sasaran Strategis 2:**

Sasaran Meningkatnya Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hunian Layak dengan indikator Persentase Lingkungan Hunian yang Tertata, capaian kinerja tahun ini sebesar 100,60% (tercapai), tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena mengalami perubahan indikator dan formulasi, serta jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 75,33%, hal ini didukung dengan adanya:

1. Kolaborasi pembiayaan dari Pemerintah Pusat melalui APBN DAK PPTK.
2. Adanya penambahan penanganan RTLH dari program BSPS dari pemerintah pusat.
3. Adanya pendampingan dari tenaga fasilitator lapangan dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Koordinasi yang baik dengan DPUTR dan BPN sehingga dapat memfasilitasi Pengembang perumahan untuk pengajuan pelepasan lahan.

Selain itu kendala/hambatan yang dihadapi berupa:

1. Adanya penolakan dari masyarakat karena kurangnya pemahaman atas urgensi pembangunan jalan lingkungan dan drainase.
2. Kurangnya kesadaran pengembang untuk menyerahkan sertifikat PSU perumahan yang sudah dipecah.

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat secara persuasif terkait urgensi pembangunan jalan lingkungan dan drainase.
2. Melakukan penagihan penyerahan sertifikat dan BAST PSU perumahan dengan surat himbauan kepada pengembang perumahan.

❖ **Sasaran Strategis 2:**

Sasaran Meningkatnya Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hunian Layak dengan indikator

Persentase Penanganan Backlog Perumahan, capaian kinerja tahun ini sebesar 99,23% (tidak tercapai), tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena mengalami perubahan indikator dan formulasi, serta jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 84,44%, hal ini didukung dengan adanya:

1. Terlaksananya sosialisasi terkait PBG rumah MBR/Subsidi kepada pemohon dan instansi terkait serta mempercepat proses verifikasi permohonan PBG rumah.
2. Adanya SK tentang kemudahan persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk rumah MBR/Subsidi.

Selain itu kendala/hambatan yang dihadapi berupa:

1. Keterbatasan pihak ketiga teknis didalam membantu masyarakat mengurus Perizinan Bangunan Gedung di Kabupaten Lumajang. Untuk pihak ketiga teknis yang dimaksud adalah Perencana untuk permohonan PBG dan Pengkaji Teknis untuk permohonan SLF.
2. Belum optimalnya kinerja pihak ketiga teknis didalam menindaklanjuti saran dan masukan teknis TPA / TPT, sehingga waktu pengurusan permohonannya menjadi lebih lama.

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut:

1. Melakukan tindak lanjut kepada pemohon dan pihak ketiga agar segera menindaklanjuti saran dan masukan teknis yang telah diberikan terkait dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

3.1.2.5.2 Rencana Tindak Lanjut dan Upaya Perbaikan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mengidentifikasi beberapa area yang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk peningkatan kinerja pada tahun 2026. Adapun rencana tindak lanjut perbaikan kinerja dimaksud disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026

No	Permasalahan	Akar Penyebab	Rencana Perbaikan Tahun Berikutnya
1	Belum optimalnya akses Sistem Penyediaan Air Minum	Terbukti dengan nilai capaian diangka 58,38%.	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur Air Minum berkolaborasi pendanaan dengan APBN
2	Belum optimalnya akses sanitasi aman	Terbukti dengan nilai capaian masih diangka 6,92%.	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur Air Limbah Domestik berkolaborasi pendanaan dengan APBN
3	Masih luasnya kawasan kumuh di Kabupaten Lumajang	sesuai dengan SK Kumuh Nomor 100.3.3.2/531/KEP/427.12/2024 seluas 673,97 Ha	Melakukan sinergi program dan kegiatan secara terpadu lintas perangkat daerah dan lintas sektor dalam penanganan kawasan kumuh;
4	Belum optimalnya penanganan backlog perumahan	Terbukti dengan nilai capaian masih diangka 63,15%.	Meningkatkan fasilitasi pembangunan rumah

3.1.2.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Tujuan				
	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	93,52%	87%	1,07%
	SASARAN 1 Meningkatnya Akses	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang	96,56%	74,2%	1,03%

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Infrastruktur Dasar	mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota			
		Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) aman	87,90%	95,70%	0,92%
	SASARAN 2 Meningkatnya Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hunian Layak	Persentase Lingkungan Hunian yang Tertata	100,60%	89%	1,13%
		Persentase Penanganan Backlog Perumahan	99,23%	97%	1,02%

Pada Tabel di atas ditunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mendukung kinerja tujuan Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025 sebesar Rp. 33.394.895.996 dan realisasinya sebesar Rp. 29.122.447.112 sehingga penyerapan anggaran sebesar 87%. Pada Tabel 3.11 ditunjukkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 1,03%, hal ini

dikarenakan indikator kinerja tujuan belum dapat tercapai 100% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin.

Sedangkan untuk mendukung kinerja **sasaran 1** Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025 sebesar Rp. 7.346.553.785,41 dan realisasinya sebesar Rp. 5.953.602.494,00 sehingga penyerapan anggaran sebesar 81% . Pada Tabel ... ditunjukkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 0,98 %, hal ini dikarenakan indikator kinerja sasaran 1 belum dapat tercapai 100% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin. Sedangkan untuk mendukung kinerja **sasaran 2** Meningkatnya Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hunian Layak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025 sebesar Rp. 16.420.661.115,78 dan realisasinya sebesar Rp. 14.660.291.988,00 sehingga penyerapan anggaran sebesar 89% . Pada Tabel ... ditunjukkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 1,12 %, hal ini dikarenakan indikator kinerja sasaran 2 belum dapat tercapai 100% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin.

Efisiensi sumber daya selain dilihat dari anggarannya juga dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang kinerja tersebut. Jika dilihat pada dokumen analisa jabatan dan peta jabatan, total kebutuhan jabatan pada Dinas Perumahan sebanyak 177 orang dan UPT PALD 16 orang, kondisi saat ini jumlah personil ASN yang ada dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 sebanyak 80 orang dengan persentase pemenuhan kebutuhan jabatan sebesar 41,45%. Meskipun demikian, keberadaan tenaga kerja paruh waktu sebanyak 36 orang juga merupakan bagian dari dukungan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah. Hal ini jika diperbandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun ini yang sebagian besar tercapai meskipun belum maksimal, maka dapat dikatakan bahwa dengan jumlah SDM yang sudah mampu untuk memenuhi target kinerjanya atau dengan kata lain tidak dapat dikatakan sudah efisien.

Sedangkan untuk sumberdaya sarana dan prasarana, kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ada saat ini dengan kondisi baik 94,43% dan rusak ringan 5,57%.Jika diperbandingkan antara rata – rata capaian kinerja tahun 2025 dengan kondisi sumber daya sarana dan prasarana yang sebagian besar kondisinya baik maka dapat dikatakan bahwa sumber daya sarana dan prasarana saat ini sudah cukup efisien namun tetap perlu dilakukan penambahan / pemenuhan dan pemeliharaan untuk memaksimalkan kinerja dan pelayanan.

3.1.2.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ditunjang oleh program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja tersebut. Adapun program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

❖ **Tujuan : Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan**

Indikator : Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan dengan target 76,90% , realisasi 71,92% dan capaiannya 93,52 %. didukung dengan sasaran strategis :

❖ **Sasaran 1 : Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar**

Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota ditunjang oleh 1 program yaitu Program PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya akses Warga Negara/Penduduk yang terlayani melalui Sistem Penyediaan Air Minum yang diukur dengan indikator Persentase Warga Negara/Penduduk yang memperoleh akses melalui Sistem Penyediaan Air Minum. Target untuk indikator ini adalah 58,39% dan realisasi 58,38% sehingga capaiannya 99,97% %. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya kolaborasi pembiayaan melalui DAK PPKT serta koordinasi dengan Perumda Tirta Mahameru.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah yang diukur dengan indikator Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota dengan target 0,12% dan realisasi 0,159%

sehingga capaiannya 133% serta indikator Jumlah Warga Negara/Penduduk yang terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari tahun N dengan target 1.300 Jiwa dan realisasi 1.780 Jiwa sehingga capainnya 137%. Hal ini tercapai bahkan lebih dari 100% karena adanya akumulasi data dengan Perumda Tirta Mahameru.

❖ **Sasaran 1 : Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar**

Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) aman ditunjang oleh 1 program yaitu Program PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah yang diukur dengan indikator Persentase Warga Negara/Penduduk yang memiliki akses sanitasi aman. Target untuk indikator ini adalah 6,82% dan realisasi 6,92% sehingga capaiannya 101,46% %. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya kolaborasi pembiayaan melalui DAK PPKT serta koordinasi dengan UNICEF.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diukur dengan indikator Persentase Warga Negara/Penduduk yang terlayani sanitasi aman tahun N dengan target 0,17% dan realisasi 0,15% sehingga capaiannya 95,7% serta indikator Jumlah Warga Negara/Penduduk yang terlayani sanitasi aman pada tahun N dengan target 1.904 Jiwa dan realisasi 1.668 Jiwa sehingga capainnya 95,7%. Hal ini tercapai namun belum maksimal.

❖ **Sasaran 2 : Meningkatnya Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hunian Layak**

Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase Lingkungan Hunian yang Tertata ditunjang oleh 4 program yaitu Program PENATAAN BANGUNAN GEDUNG, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung yang diukur dengan indikator Persentase Bangunan Gedung

dalam kondisi baik. Target untuk indikator ini adalah 2% dan realisasi 2,72% sehingga capaiannya 136,19%.

Dari penjabaran diatas bisa terlihat jika program yang menunjang sasaran 1 dan 2 mempunyai capaian kinerja yang baik, maka capaian kinerja sasaran tersebut tidak dapat dikatakan meningkat/menurun mengingat indicator baru dilaksanakan mulai TW III. Hal ini membuktikan bahwa program tersebut memang memiliki keterhubungan atau mendukung secara langsung kinerja diatasnya.

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025 adalah sebesar Rp. 33.394.895.996,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. 29.122.447.112-, atau sebesar 87%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.016.933.985	3.724.609.074	74,2%
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.329.619.800	2.228.993.420	95,7%
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.975.966.975	3.973.738.879	99,94%
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	426.948.800	402.455.160	94,3%
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	4.518.386.247	4.181.446.900	92,5%
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.593.997.820	4.534.813.751	81,1%
7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	420.038.500	420.038.500	81,5%
8	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4.448.415.375	4.056.930.042	91,2%

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
9	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	3.126.980.750	3.006.882.750	96,2%
10	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.537.607.744	2.650.254.936	74,9%

Tabel 3.13

Realisasi Anggaran Dibandingkan dengan Tahun Tahun Sebelumnya

No	Program	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	16.233.126.385	16.563.500.048	16.644.150.004	15,496,654,334	3.724.609.074
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.959.179.033	7.357.960.250	15.290.345.489	18,687,192,314	2.228.993.420
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.362.634.800	4.020.411.500	7.859.192.500	12,455,464,100	3.973.738.879
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	317.236.270	437.460.420	410.015.475	454,774,736	402.455.160
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	7.090.168.125	9.110.103.275	10,013,023,820	4.181.446.900
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.439.294.694	4.073.002.222	4.196.526.360	4,774,318,426	4.534.813.751
7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	995.530.675	1.951.787.425	919.168.750	468,721,225	420.038.500
8	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	12.622.723.657	3.265.016.850	476.937.950	9,993,242,682	4.056.930.042
9	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	409.707.525	2.772.110.996	2,458,257,578	3.006.882.750
10	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	184.786.400	168.215.900	230.639.300	215,415,279	2.650.254.936
11	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.034.320.375	1.347.291.700	463.266.237		

3.2.1 Capaian Kinerja Lain

Selain kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kerja diatas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mempunyai kinerja lain yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.14
Realisasi Rencana Aksi RB Tematik Investasi
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Utama	Rencana Aksi	Indikator	Satuan	Formulasi	Target	Realisasi	Ket
1	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	120	160	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat target dengan capaian realisasi di atas 100% yakni sebanyak 1 target. Keberhasilan ini mencerminkan upaya yang telah maksimal dalam proses administrasi dan pengawasan bangunan gedung. Peningkatan jumlah dokumen yang diterbitkan menunjukkan bahwa berbagai prosedur dan tahapan yang terkait dengan penerbitan dokumen bangunan berjalan dengan lancar dan efisien. Pencapaian ini

juga mengindikasikan adanya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat serta keberhasilan dalam mendukung tata kelola pembangunan yang lebih terstruktur dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain berkontribusi pada RB Tematik Investasi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga berkontribusi pada RB Tematik Kemiskinan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.15
Realisasi Rencana Aksi RB Tematik Kemiskinan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Utama	Rencana Aksi	Indikator	Satuan	Formulasi	Target	Realisasi	Ket
1	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah lokasi pembangunan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lokasi	Jumlah lokasi pembangunan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1	1	
		Hibah Uang Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah kelompok masyarakat penerima hibah	Kelompok Masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat penerima hibah	1	1	
		Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	112	30	Tidak terlaksana sepenuhnya karena adanya SE Bupati
		Hibah Barang Optimalisasi Jaringan Perpipaan	Jumlah kelompok masyarakat penerima hibah	Kelompok Masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat penerima hibah	2	2	
		Pembangunan Pipa Hydrant Pemadam Kebakaran	Jumlah lokasi pembangunan pipa hydrant	Lokasi	Jumlah lokasi pembangunan pipa hydrant	4	5	sesuai hasil verifikasi dilapangan dan ketersediaan anggaran dapat dilakukan pembangunan hidran sejumlah 5 unit

No	Indikator Kinerja Utama	Rencana Aksi	Indikator	Satuan	Formulasi	Target	Realisasi	Ket
		Pembangunan Air Kran Siap Minum	Jumlah lokasi Pembangunan Air Kran Siap Minum	Lokasi	Jumlah lokasi Pembangunan Air Kran Siap Minum	2	2	
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan Standar	RT	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan Standar	71	122	Adanya kolaborasi capaian dengan pembangunan Provinsi
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	RT	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	235	206	Adanya efisiensi anggaran pada awal tahun sehingga baru dapat terealisasi pada pertengahan TW II
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Rusunawa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	
		Belanja Uang Ganti Rugi Lahan Untuk Warga Terdampak Pelebaran Jalan	Luas lahan yang diganti rugi	Bidang	Luas lahan yang diganti rugi	14	10	Ada penolakan dari warga
		Rehab Rekon Pagar Rumah	Jumlah penerima rehab rekon	Unit Rumah	Jumlah penerima rehab rekon	7	7	
		Rehab Rekon & Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Jumlah penerima rehab rekon	Unit Rumah	Jumlah penerima rehab rekon	79	78	Ada penolakan dan pembatalan penerima bantuan
		Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Jumlah Bidang yang dilakukan pembiayaan	Bidang	Jumlah Bidang yang dilakukan pembiayaan	20	14	Ada penolakan dari warga

No	Indikator Kinerja Utama	Rencana Aksi	Indikator	Satuan	Formulasi	Target	Realisasi	Ket
		Pembiayaan Perubahan SHM Eksisting Warga Terdampak Program						
		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit Rumah	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	9	9	
		Bantuan Sosial Pemugaran Kawasan Kumuh KOTAKU APBD	Jumlah penerima bantuan sosial	Kelompok Masyarakat	Jumlah penerima bantuan sosial	1	1	
		Bantuan Sosial Uang Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni pencegahan Kawasan Kumuh	Jumlah penerima bantuan sosial	Unit Rumah	Jumlah penerima bantuan sosial	189	204	Ada kolaborasi capaian melalui BSPS
		Belanja Modal Jalan Peningkatan PSU Perumahan	Jumlah lokasi yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	Jumlah lokasi yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1	1	
		Belanja Modal Pembangunan Jalan dan Drainase Lingkungan	Jumlah lokasi yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	Jumlah lokasi yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang	1	1	

No	Indikator Kinerja Utama	Rencana Aksi	Indikator	Satuan	Formulasi	Target	Realisasi	Ket
					Menunjang Fungsi Hunian			
		Belanja Modal Pembangunan Pedestrian Jalan Lingkungan	Jumlah lokasi yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	Jumlah lokasi yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1	1	
		Belanja Modal Pembangunan Jembatan Lingkungan	Jumlah lokasi yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	Jumlah lokasi yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1	1	
		Pembangunan Sumur Bor	Jumlah unit sumur bor yang dibangun	Unit	Jumlah unit sumur bor yang dibangun	1	1	
		Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal	Jumlah pemanfaat tangki septik skala komunal	SR	Jumlah pemanfaat tangki septik skala komunal	89	89	

Pencapaian ini mengindikasikan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu terus melakukan pendekatan dan pelayanan kepada Masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas layanan serta keberhasilan dalam mendukung tata kelola pembangunan yang lebih terstruktur dan sesuai dengan regulasi yang berlaku

3.2.2 Penghargaan

Selain itu pada Tahun 2025 ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berhasil memperoleh beberapa penghargaan yaitu:

1. Peringkat ke-5 (Lima) dalam penilaian mandiri evaluasi kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 20 Tahun 2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2025.



2. Termasuk ke dalam 5 perangkat daerah terbaik dalam penilaian mandiri evaluasi kelembagaan perangkat daerah dengan mendasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2025.



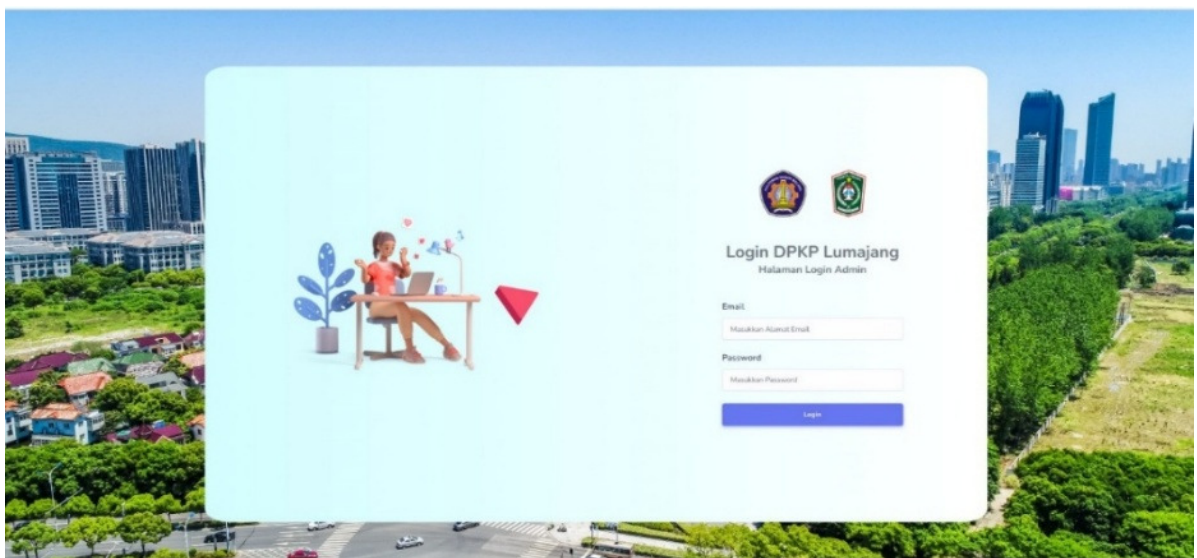
3. Perangkat daerah terbaik ke-2 (Dua) dalam penilaian evaluasi FRC (*Fraud Risk Control*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2025.



3.1.3 Inovasi

Pada tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melakukan inovasi untuk menunjang kinerja yakni inovasi berbasis teknologi geospasial yang bernama PLAYON MAS (Pelayanan Online Masyarakat). Inovasi ini dibuat untuk menyelesaikan isu strategis dalam konteks penanggulangan kemiskinan khususnya dalam penyediaan hunian yang layak huni bagi seluruh masyarakat dengan menyediakan basis data perumahan yang difungsikan untuk menginventarisasi data di sektor perumahan dan kawasan permukiman. Sebelum diterapkannya inovasi berbasis teknologi geospasial PLAYON MAS, pendataan

terkait perumahan dan kawasan permukiman masih dilakukan secara manual dan terbatas dalam bentuk tabel. Akibatnya akurasi data lemah sebab tidak mampu memberikan gambaran secara visual dan spasial serta sulit untuk diverifikasi di lapangan. Kondisi tersebut dianggap sudah tidak efektif karena tidak relevan dengan kebutuhan perangkat daerah. Setelah adanya inovasi PLAYON MAS ini, pendataan menjadi lebih presisi sebab menggunakan aplikasi mobile dan web berbasis GPS. Melalui visualisasi koordinat ini maka pengambilan keputusan pada perangkat daerah menjadi lebih efektif sebab berbasis bukti spasial dengan memperhatikan konteks geografis dan kerentanan wilayah. Monitoring data juga menjadi lebih efisien sebab *dashboard* dapat diakses oleh publik dan pemangku kepentingan sehingga kolaborasi antar-instansi merujuk pada peta dan database yang sama.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025, terdapat beberapa area kinerja yang memerlukan perbaikan dan penguatan pada tahun 2026. Upaya yang akan dilakukan antara lain:

1. Melakukan sinergi program dan kegiatan lebih lanjut secara terpadu lintas perangkat daerah dan lintas sektor terkait kolaborasi perencanaan dan pembiayaan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan yang mendukung IKU perangkat daerah agar lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil.
3. Memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan guna memastikan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Rencana tindak lanjut ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2026 yaitu:

1. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur Air Minum berkolaborasi pendanaan dengan APBN.
2. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur Air Limbah Domestik berkolaborasi pendanaan dengan APBN.
3. Melakukan sinergi program dan kegiatan secara terpadu lintas perangkat daerah dan lintas sektor dalam penanganan kawasan kumuh.
4. Meningkatkan fasilitasi pembangunan rumah.

LAMPIRAN

❖ DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA LAMA



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARIS PIDEKSO, S.T., M.T.**

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si**


Jabatan : Pj. Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Pihak Pertama

ARIS PIDEKSO, S.T., M.T.
NIP. 19720526 200604 1 018


**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LUMAJANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar	Persentase Akses Air Minum yang Layak	83,66%
		Persentase Akses Air Limbah Domestik yang Layak	70,11%
		Persentase Panjang Drainase Lingkungan Terbangun	62,01%
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hunian	Persentase Luasan Lingkungan Hunian Yang tertata	8,58%
3.	Meningkatnya angka pemenuhan hunian	Persentase Penanganan Backlog Perumahan	3,06%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 13.287.481.254,30	DAU, DAU Earmarked, DAK
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 9.068.408.150,00	DAU, DAU Earmarked, DAK
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 3.499.881.174,84	DAU, DIF
4.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 461.494.800,00	DAU, DIF
5.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 3.907.856.248,00	DAU, DIF
6.	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 923.489.500,00	DAU, DIF
7.	Program Kawasan Permukiman	Rp. 4.409.892.500,00	DAU, DAK, DIF
8.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 2.110.874.750,00	DAU, DIF
9.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 3.618.901.422,28	DAU, DAK, DIF
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.314.732.784,40	DAU, DIF
	JUMLAH	Rp. 46,603,012,583,82	

Lumajang, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LUMAJANG

Pj. BUPATI LUMAJANG

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si


ARIS PIDEKSO, S.T., M.T.
NIP. 19720326 200604 1 018

❖ **DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA BARU**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARIS PIDEKSO, S.T., M.T.**

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si**

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 1 September 2025

Pihak Kedua


Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si

Pihak Pertama


ARIS PIDEKSO, S.T., M.T.
NIP.: 19720526 200604 1 018

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LUMAJANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar	Presentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di Kabupaten/Kota	0,55%
		Persentase peningkatan umlah penduduk yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) aman	0,17%
2.	Meningkatnya pemenuhan dan peningkatan kualitas lingkungan hunian layak	Persentase lingkungan hunian yang tertata	5,10%
		Persentase Penanganan Backlog Perumahan	63,64%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 4.381.578.386,66	DAU, DAK
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 2.329.627.800,00	DAU, DAK
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 3.975.967.074,84	DAU, DIF
4.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 426.948.800,00	DAU, DIF
5.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 4.518.386.246,50	DAU, DIF
6.	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 20.038.500,00	DAU, DIF
7.	Program Kawasan Permukiman	Rp. 4.385.721.500,00	DAU, DAK, DIF
8.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 3.126.980.750,00	DAU, DIF
9.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 3.537.607.744,28	DAU, DAK, DIF
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.594.361.820,34	DAU, DIF
	JUMLAH	Rp. 32.697.218.622,62	

Lumajang, 1 September 2025

BUPATI LUMAJANG



Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si

KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LUMAJANG



ARIS PIKRSO, S.T., M.T.
NIP. 19920326 200604 1 018

❖ **MATRIK TUJUAN, SASARAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi	Target	Penghitungan Kinerja	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (PHLTB Proksi) = { (Jumlah Rumah Tangga Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (JRTHLTB Proksi)) / (Jumlah Rumah Tangga (JRT)) } x 100%'	76,90	Hasil penghitungan dari BPS	71,92

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Target	Penghitungan Kinerja	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	Capaian Warga Negara/Penduduk yang Memperoleh Akses Melalui Sistem Penyediaan Air Minum hingga Tahun N dikurangi Capaian Warga Negara/Penduduk yang Memperoleh Akses Melalui Sistem Penyediaan Air Minum hingga Tahun N-1	0,55	Capaian Warga Negara/Penduduk yang Memperoleh Akses Melalui Sistem Penyediaan Air Minum hingga Tahun 2025 58,38% dikurangi Capaian Warga Negara/Penduduk yang Memperoleh Akses Melalui Sistem Penyediaan Air Minum hingga Tahun N-1(2024) sebesar 57,8442992534699%	0,53
		Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) aman	Capaian Warga Negara/Penduduk yang memiliki akses sanitasi aman hingga Tahun N dikurangi Capaian Warga Negara/Penduduk yang memiliki akses sanitasi aman hingga Tahun N-1	0,17	Capaian Warga Negara/Penduduk yang memiliki akses sanitasi aman hingga Tahun 2025 masih 6,92% dikurangi Capaian Warga Negara/Penduduk yang memiliki akses sanitasi aman hingga	0,15

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Target	Penghitungan Kinerja	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hunian Layak	Persentase Lingkungan Hunian yang Tertata	$= \{ ((\text{Luas Kawasan Kumuh yang ditangani Tahun N} + \text{Luas Kawasan Kumuh yang ditangani sampai dengan Tahun N-1}) \text{ dibagi Total Luas Kawasan Kumuh} \times 100\%) + (\text{Jumlah RTLH yang tertangani pada Tahun N} \text{ dibagi Jumlah RTLH pada Tahun N} \times 100\%) + (\text{Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di Tahun N} \text{ dibagi Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di Tahun N} \times 100\%) \} / 3$	5,10	$\{ (\text{Luas Kawasan Kumuh yang ditangani Tahun 2025 yaitu 27,46 ha} + \text{Luas Kawasan Kumuh yang ditangani sampai dengan Tahun 2024 yaitu 6,61 Ha} \text{ dibagi Total Luas Kawasan Kumuh sebesar 763,97} \times 100\%) + (\text{Jumlah RTLH yang tertangani pada Tahun 2025 yaitu 259 unit rumah} \text{ dibagi Jumlah RTLH pada Tahun 2025 sejumlah 19.960 unit rumah} \times 100\%) + (\text{Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di Tahun N yaitu (69+608) lokasi} \text{ dibagi Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di Tahun N yaitu 7.027 lokasi} \times 100\%) \} / 3$	5,13

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Target	Penghitungan Kinerja	Realisasi Kinerja
1	2	3 Persentase Penanganan Backlog Perumahan	4 = (Jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang perumahan + Jumlah rumah pembangunan baru korban bencana + Jumlah rumah pembangunan baru terdampak relokasi program pemerintah + Jumlah rumah diluar perumahan yang memiliki PBG + Jumlah Pembangunan Rumah Swadaya + Jumlah Pembangunan Rumah Baru Penanganan Kumuh + Jumlah Perbaikan RTLH) sampai dengan tahun N dibagi backlog rumah x 100 %	5 63,64	6 (Jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang perumahan yaitu 1.096 unit + Jumlah rumah pembangunan baru korban bencana yaitu 0 unit + Jumlah rumah pembangunan baru terdampak relokasi program pemerintah yaitu 0 unit + Jumlah rumah diluar perumahan yang memiliki PBG yaitu 6 unit + Jumlah Pembangunan Rumah Swadaya yaitu 36.514 unit+ Jumlah Pembangunan Rumah Baru Penanganan Kumuh yaitu 9 unit + Jumlah Perbaikan RTLH yaitu 259 unit) sampai dengan tahun N sejumlah 54.122 unit rumah dibagi backlog rumah 85.702 unit rumah x 100 %	7 63,15

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formulasi	Target	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Warga Negara/Penduduk yang memperoleh akses melalui Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Warga Negara/Penduduk yang terakses Sistem Penyediaan Air Minum sampai dengan tahun N dibagi jumlah Warga Negara/Penduduk Kabupaten Lumajang tahun N X 100%	58,39	3.724.609.074	58,38
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan	0,12	3.724.609.074	0,159

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formulasi	Target	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
		perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N dibagi Jumlah total penduduk kabupaten/kota x 100%			
		Jumlah Warga Negara/Penduduk yang terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari tahun N	Jumlah Warga Negara/Penduduk yang terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari tahun N	1300	3.724.609.074	1.780
1	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	2	863.165.090	2
2	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Ditingkatkan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Ditingkatkan	6	595.646.000	6
3	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	112	8.618.000	30
4	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dibangun	0	441.915.300	-
5	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dioptimalisasi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dioptimalisasi	2	582.111.700	5
6	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	200	1.233.152.984	200
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Warga Negara/Penduduk yang memiliki akses sanitasi aman	Jumlah penduduk yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar + jumlah rumah tangga yang tersambung pada jaringan perpipaan PALD-T skala permukiman berbasis	6,82	2.228.993.420	6,92

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formulasi	Target	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
			masyarakat/ permukiman/ perkotaan/kawasan tertentu/regional pada tahun N + Jumlah penduduk yang tersambung pada jaringan perpipaan SPALD-T skala permukiman berbasis masyarakat/permukiman/ perkotaan/kawasan tertentu/regional + jumlah rumah tangga yang terlayani jasa penyedotan lumpur tinja pada tahun N dibagi Jumlah penduduk di kabupaten x 100%			
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara/Penduduk yang terlayani sanitasi aman tahun N	Jumlah Warga Negara/Penduduk yang terlayani sanitasi aman pada tahun N/Penduduk Kabupaten Lumajang Tahun N x 100%	0,17	2.228.993.420	0,15
		Jumlah Warga Negara/Penduduk yang terlayani sanitasi aman pada tahun N	Jumlah Warga Negara/Penduduk yang terlayani sanitasi aman pada tahun N	1904	2.228.993.420	1.668
1	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan	25	2.308.800	25
2	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	316	321.265.963	206
3	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	0	-	-
4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	5	85.079.757	5

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formulasi	Target	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
5	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	6	15.625.000	50
6	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan Standar	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan Standar	160	1.804.713.900	211
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pengelolaan Drainase Lingkungan	Panjang Drainase Lingkungan yang Tertangani hingga Tahun N dibagi Total Panjang Drainase Lingkungan x 100%	0,10	3.973.738.879	0,10
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Drainase Lingkungan yang Tertangani	Panjang Drainase Lingkungan yang Tertangani Tahun N dibagi Target Panjang Drainase Lingkungan yang Tertangani Tahun N x 100%	100	3.973.738.879	100
1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	0	-	-
2	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	42	3.973.738.879	42,0
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik	Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki SLF dibagi Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki PBG x 100%	2,00	402.455.160	2,72
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase permohonan perizinan bangunan gedung yang difasilitasi	Jumlah dokumen PBG ditambah dokumen SLF yang terbit pada Tahun N dibagi Jumlah permohonan PBG ditambah jumlah permohonan SLF yang telah dikonsultasikan pada Tahun N x 100%	100	402.455.160	100

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formulasi	Target	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	120	402.455.160	160
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PERSENTASE KAWASAN YANG TERTANGANI	JUMLAH KAWASAN DESA TERTANGANI / JUMLAH KAWASAN DESA X 100	8,29	4.181.446.900	14,63
1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Desa yg ditangani	Jumlah Kawasan Desa yg ditangani	17	4.181.446.900	30
1	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	17	4.181.446.900	30
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN FASILITASI KEBUTUHAN OPERASIONAL PERKANTORAN	(JUMLAH FASILITASI KEBUTUHAN OPERASIONAL KANTOR YANG DIPENUHI)/(JUMLAH FASILITASI KEBUTUHAN OPERASIONAL KANTOR YANG DIRENCANAKAN) X 100%	100	4.534.813.751	100
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	(jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang	100	4.822.000	100

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formulasi	Target	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
			dipenuhi)/(jumlah fasilitasi dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang direncanakan) x 100			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	1.532.000	3
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1.570.000	1
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	839.000	1
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	-	5
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	881.000	16
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(jumlah fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi)/(jumlah fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah yang direncanakan) x 100	100	3.431.275.038	100
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33/12	3.324.058.038	34/12
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	98.750.000	12

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formulasi	Target	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	2.972.000	12
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15	1.065.000	15
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	3.923.000	3
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13	507.000	13
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	(jumlah fasilitasi administrasi BMD perangkat daerah yang dipenuhi)/(jumlah fasilitasi administrasi BMD perangkat daerah yang direncanakan) X 100	100	1.982.000	100,00
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	1.982.000	2
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25	-	25
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15	-	15
4	Pemanfaatan BMD SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	-	1
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	(jumlah fasilitasi administrasi Umum perangkat daerah yang	100	152.864.099	100

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formulasi	Target	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
			dipenuhi)/(jumlah fasilitas administrasi Umum perangkat daerah yang direncanakan) x 100			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	14.184.690	1
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	59.780.730	2
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	18.935.070	2
4	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	-	-
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	5.985.000	12
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	53.978.609	12
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	(jumlah fasilitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipenuhi)/(jumlah fasilitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang direncanakan) x 100	100	577.406.390	100
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	119.648.374	12
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	457.758.016	12

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formulasi	Target	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	Jumlah Fasilitaasi Pemeliharaan BMD yang terpenuhi / Jumlah Fasilitas Pemeliharaan BMD yang direncanakan x 100	100	366.464.224	100
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	164.599.019	23
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	87	56.587.000	87
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	145.278.205	1
7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun-N dibagi Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun-N x 100%	100	97.032.500	100
		2. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	Jumlah warga negara terkena relokasi program kabupaten/kota yang mendapatkan layanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni pada tahun-N dibagi Jumlah total rencana warga negara terkena relokasi program kabupaten/kota yang akan	100	43.228.000	100

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formulasi	Target	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
			ditangani pada tahun-N) x 100%			
		3. Persentase Koordinasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Koordinasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dilakukan Tahun N dibagi Jumlah Perumahan yang telah diterbitkan Rekomendasi Teknisnya pada Tahun N-1 x 100%	100	222.061.700	100
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana ditambah Jumlah Dokumen Relokasi Program Kabupaten yang tersedia pada Tahun N dibagi Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana ditambah Jumlah Dokumen Relokasi Program Kabupaten yang direncanakan pada Tahun N x 100%	1	97.032.500	1
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	97.032.500	1
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase Pembangunan Rumah Khusus untuk Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten	Jumlah Rusus untuk Korban Bencana ditambah Jumlah Rusus Relokasi Program Kabupaten yang terbangun dibagi Jumlah Rusus untuk Korban Bencana ditambah Jumlah Rusus Relokasi	100	43.228.000	-

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formulasi	Target	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
			1Program Kabupaten yang direncanakan x 100%			
1	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	43.228.000	-
3	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Fasilitasi Dokumen Rekomendasi Teknis Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang diterbitkan Tahun N dibagi Jumlah Pengajuan Rekomendasi Teknis Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Tahun N x 100%	100	222.061.700	100
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	21	203.806.000	37
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1	18.255.700	1
8	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	(Luas Kawasan Kumuh yang ditangani Tahun N + Luas Kawasan Kumuh yang ditangani sampai dengan Tahun N-1) dibagi Total Luas Kawasan Kumuh x 100%	4,34	4.056.930.042	4,46
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1. Luas kawasan kumuh yang ditangani	Luas kawasan kumuh yang ditangani	26,6	4.056.930.042	27,46

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formulasi	Target	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
		2. Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	(Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani tahun N) dibagi (Target luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha pada tahun N) x 100%	100,0	4.056.930.042	128
1	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	79	3.060.937.592	78
2	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	9	630.000.000	9
3	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	1,25	365.992.450	1,60
9	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Jumlah RTLH yang tertangani pada Tahun N dibagi Jumlah RTLH pada Tahun N x 100%	1,43	3.006.882.750	1,29
1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Penanganan RTLH pada Tahun N dibagi Jumlah Rencana Penanganan RTLH pada Tahun N x 100%	100	3.006.882.750	108
1	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	189	3.006.882.750	204
10	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU hingga Tahun N dibagi Total jumlah perumahan x 100%	9,63	2.650.254.936	9,63

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formulasi	Target	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1. Persentase perumahan yang difasilitasi penyediaan dan perbaikan PSU Jalan Lingkungannya	Jumlah penyediaan dan perbaikan PSU Jalan Lingkungan Tahun N dibagi Target penyediaan dan perbaikan PSU Jalan Lingkungan Tahun N x 100%	100	2.650.254.936	100
		2. Persentase perumahan yang difasilitasi penyediaan dan perbaikan PSU Drainase Lingkungannya	Jumlah penyediaan dan perbaikan PSU Drainase Lingkungan Tahun N dibagi Target penyediaan dan perbaikan PSU Drainase Lingkungan Tahun N x 100%	100	2.650.254.936	100
1	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	6.921.300	1
2	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	1	1.607.000	1
3	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	69	2.641.726.636	69

❖ DOKUMENTASI KEGIATAN

